LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN DESEMBER DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Selasa, 28 Desember 2021

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Dinas
3. Para Kasi
4. Bendahara Pengeluaran
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Pejabat Verifikasi Pejabat Pengadaan Barang /Jasa

D. Notulis

Pelaksana Sub Bag Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 100 %

b.Keuangan = 19.888.357.988 (96,54%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	0	0	0			
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	21	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Pada Tahun 2021 penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditentukan. Capaian Fisik 100 % dan capaian keuangan 96, 54 %.

Upaya

Pada Tahun Anggaran 2022 lebih memaksimalkan kinerja sehingga dapat sesuai dengan target yang ditentukan, baik capaian fisik maupun keuangan.

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Pada Bulan Desember ini, kegiatan sudah terlaksana semua, capaian fisik sudah sesuai target 100%
2. Monev SPJ akan dilakukan PPK, Program dan Keuangan setiap bulan.
3. Verifikasi silang antar bidang.
4. Evaluasi serapan fisik dan keuangan akan dilakukan sebelum rapat pengendalian, setiap tanggal 5 bulan berikutnya dan apabila -> form realisasi serapan keuangan yang harus diiisi admin bidang.
5. Agar dibuatkan Pengendalian Pra Rakor Admin Bidang, tujuannya untuk admin dapat memonitoring realisasi setiap bulannya. Pada table dicantumkan ada realisasi fisik dan realisasi keuangan, dan dapat ditambahkan sisa anggaran. Pada Pertengahan tahun biasanya dilakukan perubahan anggaran, pengendalian pra rakor juga dapat digunakan untuk perencanaan pada perubahan anggaran. Koordinator Realisasi Fisik ada pada Kasubag Program, Koordinator realisasi keuangan ada pada Kasubag Keuangan.

6. Rakor Pengendalian diharapkan tidak dilakukan seperti yang dulu, pengendalian yang biasanya hanya dilakukan pelaporan hasil rekap, harusnya juga dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

V. PENUTUP

Kesimpulan rapat koordinasi pengendalian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi fisik 100 % sesuai dengan terget yang ditentukan, namun realisai keuangan 96,54 %.
2. Pada Tahun 2022 agar lebih memaksimalkan kinerja sehingga capaian fisik dan keuangan dapat sesuai dengan target yang ditentukan.

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Desember 2021, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Selasa 28 Desember 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PERREMPUAN, PERLIDNUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELAURAGA BERENCANA

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM
NIP. 196811241993102001